

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)¹, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu

¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.³

Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUH Perdata).
5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.⁴

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum

²Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1978. h. 9

³Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermasa, 2002, h. 1.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, h. 5

agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁵

Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Disamping hal tersebut, pada saat itu dikenal pula yang namanya “perkawinan campuran” yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran antar tempat dan perkawinan campuran antar agama.⁷ Saat ini yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah untuk perkawinan internasional.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁸

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

⁵Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1988, h. 55.

⁶Hilman Hadikusuma, *Op-.cit* h. 12.

⁷Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran*, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, h. 3.

⁸K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia , 1982, h. 3.

dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil.

Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.⁹ Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

⁹Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung , Alumni, Cetakan Kesebelas, 2000 h. 8

¹⁰*Ibid*

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹¹ Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sah suatu perkawinan.

Dalam prakteknya di masyarakat ada pula orang yang hanya melakukan perkawinan dengan cara keagamaannya saja dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama. Disamping itu ada pula yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari UU Perkawinan yakni :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami-istri harus bersatu antara jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
- h. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang

¹¹ *Ibid.* h. 10

Penjelasan mengenai arti perkawinan sesuai agama dan kepercayaan yang mana semuanya bertujuan sama yaitu untuk menjadi keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan.

Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan “Tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan”.¹²

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan serta ada pula permasalahan hukum pada perkawinan yang dicatatkan saja namun tidak dilakukan melalui suatu upacara keagamaan. Hal itu jelas tidak sesuai dengan UU Perkawinan yang mengatur mengenai sahnyanya suatu perkawinan.

Tatacara perkawinan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai tatacara perkawinan diatur pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan “Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada ayat (3) disebutkan “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

¹²Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* h.7

Pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian dari dakwah Islam, banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang perkawinan atau perjodohan bahkan Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan melakukan zina;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."*¹³

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang Perkawinan akan membawa implikasi kepastian hukum bagi keluarga dan keturunannya dan berimplikasi mengurangi praktek-praktek asusila ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan dengan benar dan syah menurut hukum agama maupun benar menurut hukum negara akan terbentuk keluarga yang baik yang taat dengan peraturan dan agama. Dari kumpulan keluarga yang baik yang taat peraturan dan taat agama, akan menghasilkan keluarga yang sakinah mawadadah warahmah dan terbentuklah masyarakat yang Islami.

Oleh karena itu implementasi Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus dimenej dengan sebaik-baiknya agar tujuan pernikahan itu dapat terwujud. Sehingga tidak terjadi perkawinan dibawah umur, perkawinan yang melanggar aturan yang berlaku semisal sirri.

¹³, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit CV Toha Putara Semarang, tahun 1989, h.429

Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan adalah:

“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.¹⁴

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab¹⁵, mengatakan bahwa, yaitu :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari dua defenisi tersebut dapat diambil penegertian dimana suatu kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik masalah administrasi maupun dampak dari diterapkannya suatu kebijakan tersebut baik terhadap ekonomi, sosial, budaya, agama dan politik. Sehingga dalam hal implementasi tersebut sangat dibutuhkan adanya rekayasa sosial.

Menurut Joseph S. Roucek dan Roland L. Warrin, “rekayasa sosial adalah suatu usaha untuk mengarahkan perubahan sosial melalui beberapa jenis rencana

¹⁴Indiahono, Dwiyanto, *Perbandingan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media. tahun 2009, h.256

¹⁵ Wahab Solichin Abdul. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara, tahun 2008, h.65

yang tersusun rapi”¹⁶. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa rekayasa sosial adalah upaya terencana untuk mengarahkan perubahan sosial kearah yang lebih baik. Dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut;

....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*¹⁷

Dari definisi dan penjelasan Al-qur'an tersebut dapat dipahami, bahwa untuk melakukan perubahan kondisi masyarakat yang tidak baik, maka pelaku rekayasa harus terlebih dahulu membuat perencanaan perubahan dengan menetapkan tujuan, strategi, media aksi, dan obyek aksi. Selain itu, perlu pula mempersiapkan sumberdaya manusia handal yang akan bertindak sebagai *agent of change*.¹⁸ Rekayasa sosial dalam rangka mengimplemenatsikan undang-undang perkawinan dibutuhkan manajemen yang baik dalam kaitannya adalah manajemen dakwah.

“A.Rosyad Shaleh mengatakan manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas , menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana

¹⁶ Muhammad Munir, S.Ag., MA., Wahyu Ilaihi, S.Ag., MA. *Manajemen Dakwah*, Jakarta, Kecancana Cet. I tahun 2000, h254

¹⁷ Depag RI, *Op.cit*, h. 370

¹⁸ Muhammad Munir, S.Ag., MA., Wahyu Ilaihi, S.Ag., MA, *Op-cit*, h. 256

dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan pencapaian tujuan dakwah ”.¹⁹

Jadi inti dari manajemen dakwah adalah adanya proses perencanaan dan pengaturan yang sistematis dan koordinatif dalam sebuah kegiatan atau aktifitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari suatu kegiatan dakwah. Dengan demikian peran Kantor Urusan Agama selaku instansi terdepan Kementerian Agama yang berwenang dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Undang-undang perkawinan memerlukan perencanaan, pengorganisasian dan pengaturan dalam mencapai tujuan.

Adapun Tugas pokok Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk.
- d. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang

¹⁹ *Ibid*, h.36

diterapkan oleh Dirjen Bimbingan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Juga diperjelas dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 2 Jo. **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah** pasal 1 huruf ayat (1). Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka dalam melaksanakan tugasnya, KUA menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu unit kerja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dengan salah satu tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan di bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) dalam wilayah kerja Kecamatan Tanjung Bintang. Sebagai unit kerja, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang dalam hal pelaksanaan tugas telah sejalan dengan kebijaksanaan yang diterapkan dari pusat.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang maka telah ditetapkan visi dan misi sebagai berikut :

1) Visi

Meningkatkan pengamalan kehidupan beragama dalam suatu keluarga dan masyarakat.

2) Misi

Adapun misinya adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan agama Islam.
- b. Meningkatkan masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari - hari.
- c. Terjaminnya hubungan pernikahan yang syah dan dilindungi oleh undang - undang.
- d. Terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah dalam suatu rumah tangga.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepedulian social yang tinggi.
- f. Terciptanya suasana masyarakat yang aman dan tenteram dalam menjalankan ajaran agamanya.
- g. Terselenggaranya administrasi kantor yang dinamis.

Dalam pelaksanaan program, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang sebagaimana juga Kantor Urusan Agama Kecamatan lainnya, melakukan tata usaha kantor, tugas – tugas yang berkenaan dengan pencatatan nikah, kemasjidan, zakat wakaf dan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan tugas – tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang memiliki ruang lingkup kegiatan yang cukup luas sehingga dalam pelaksanaan tugas – tugasnya harus mengedepankan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dalam upaya pembinaan keluarga Sakinah melalui implementasi Undang-undang nomor 1 tahun 1974, KUA Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan melakukan sosialisasi melalui kegiatan Majelis Taklim, pertemuan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Selanjutnya pernikahan dilaksanakan di Balai Nikah dan juga di rumah mempelai berdasarkan permintaan. Pelaksanaan nikah tersebut melalui prosedur pendaftaran, penelitian berkas dan dilanjutkan mengikuti suscatin (kursus calon pengantin) yang kemudian pelaksanaan aqad nikah harus sesuai dengan syariat Islam (adanya pengawasan) dan dijadwal yang sudah disepakati dan pemberian buku nikah sebagai bukti kepastian hukum (tercatat).

Berdasarkan pengamatan awal di Kecamatan Tanjung Bintang masih ditemui adanya pernikahan yang tidak tercatat, adanya oknum tertentu oknum tertentu yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan. Juga ditemukan adanya nikah dibawah umur yang terjadi akibat faktor pergaulan bebas yang akibatnya putus sekolah karena harus menikah. Selain dari itu dengan adanya pernikahan masal yang begitu banyak diikuti oleh masyarakat ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi Undang-undang Perkawinan di lokasi penelitian.

Penelitian ini akan dituangkan dalam tesis mengenai Peran Kantor Urusan Agama dalam implementasi Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberikan kewenangan melakukan pelaksanaan nikah, pengawasan sekaligus pencatatan dan pelaporannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berbagai penjabaran dengan uraian sebelumnya, maka sebuah pembahasan yang diangkat dalam pengidentifikasian masalah adalah sebagai berikut;

- a. Upaya menciptakan keluarga sakinah mawadah wa rohmah, sebagaimana tujuan pernikahan.
- b. Adanya upaya pencegahan terhadap pernikahan dini dan perceraian.
- c. Sosialisasi Undang-undang Perkawinan ditengah-tengah masyarakat.
- d. Pernikahan monogami, tercatat dan menghindari pernikahan tidak tercatat.

2. Batasan Masalah

Berbagai penjabaran dari poin-poin identifikasi masalah yang masih luas maka akan memberikan batasan masalah agar focus pembahasan yang hendak dijelaskan terkena. Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah;

- a. Pelaksanaan Implementasi Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyangkut didalamnya tujuan yang akan dicapai, sosialisasi, akibat dari kebijakan yang diterapkan maupun bila tidak diterapkan, faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Peran KUA dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan kantor Urusan Agama yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Islam setempat melalui implementasi undang-undang perkawinan No. 1

Tahun 1974 sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akherat..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian dan penulisan tesiss ini adalah;

“Bagaimana pelaksanaan implementasi Undang -undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang dan apa saja peran KUA Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut adalah erat kaitanya untuk menjelaskan secara detail, adapun tujuannya ialah;

- a. Ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan implementasi Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di Kecamatan **tanjung** Bintang.
- b. Ingin mengetahui dan menganalisa peran apasaja yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimplementasikan Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

2. Kegunaan Penelitian

Adapun berbagai kegunaan penelitian yang bisa dicapai dan dirasakan manfaatnya terkait dengan penelitian ini, diantaranya ialah:

- a. Dapat memberikan dan dapat dijadikan sebagai bahan penambahan khazanah keilmuan yang dibutuhkan oleh penulis ataupun kalangan dari segala unsur yang membutuhkan.
- b. Dipandang dapat memberikan sumbangsih bagi instansi Perguruan Tinggi tempat penulis menempuh pendidikan dan bagi penulis sendiri sebagai persyaratan baginya untuk memperoleh gelar dan keilmuan yang selama ini dilakukan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini sangat penting, untuk menjadikan sebuah penulisan ada tidaknya persamaan ataupun perbedaan baik teori yang digunakan dalam pendekatannya maupun metode pengumpulan data dan kesimpulan yang dikaji, sejauh penulsi menggali maka ditemukan berapa rujukan yang dapat menjadi acuan dalam kajian pustaka diantaranya;

1. Muhammad, NIM. 000.201.0044-H, berjudul: *Konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary Ditinjau Menurut UU. Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. Tesis ini membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary tentang bagaimana hukum pernikahan, rukun dan syaratnya dan tatacaranya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah sebagaimana yang tertuang dalam kitab An Nikah yang hasilnya dikaji berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan di

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaannya penelitian ini adalah pada taraf pelaksanaan nikah secara hukum agama yang dikaitkan dengan Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena penelitian ini tidak membahas masalah hukum pelaksanaan nikah secara hukum agama.

2. M. Rasyidi, NIM. 07.0202.0360, berjudul: *Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Nikah dan Perceraian di Kec Rantau Badauh Kab. Barito Kuala*.

Penelitian ini membahas pendapat yang menjadi sikap dari guru-guru agama yang ada di Wilayah Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang hukum dari pencatatan nikah dan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak membahas pendapat tentang pencatatan nikah dan perceraian tanpa melalui pengadilan agama yang mestinya dilakukan istbat terlebih dahulu, sehingga yang membedakannya dengan penelitian ini adalah bagaimana peran KUA-nya dan pelaksanaan implementasi UUP nomor 1 tahun 1974.

3. Rusinah, NIM. 05.01.02.0208, berjudul: *Perkawinan Poligami (Studi Kritis Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Penelitian ini mengkaji tentang terjadinya poligami dalam sebuah perkawinan, seperti: hukumnya, alasan-alasan dibolehkannya, tata caranya, hak-hak isteri bersangkutan, konsekuensinya ketika telah terjadi pernikahan poligami, dan problematikanya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak membahas tidak membahas secara khusus tentang perkawinan poligami yang menyangkut pelaksanaan Implementasi UUP nomer 1 tahun 1974 dan lebih

mengarah peran KUA dalam kaitannya dengan implementasi UUP nomor 1 tahun 1974.

F. Kerangka Fikir

Dengan adanya kerangka fikir dibawah ini diharapkan dapat memperjelas alur dari Peran KUA Kecamatan Tanjung Bintang dalam menyelenggarakan kegiatan Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun kerangka fikirnya dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar :1 Sekema Kerangka Pikir Peran KUA Dalam Mengimplementasikan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Di Kecamatan Tanjung Bintang



Dari uraian kerangka berfikir dapat dijelaskan bahwa;

1. Pelaksanaan implementasi Undang-undang perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang dimulai sejak berdirinya tahun 1982 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dimana proses pernikahan/rujuk sebagai implementasi UUP nomor 1 tahun 1974 itu dimulai dari warga ke Kantor Desa untuk memperoleh persyaratan kehendak nikah/rujuk, setelah itu ke Puskesmas untuk memperoleh faksin TT 1 dilanjutkan ke Kantor KUA untuk didata dan diperiksa kelengkapan, setelah itu baru menuju akad nikah dan memperoleh legalitas berupa buku nikah.

2. Dimana dalam pelaksanaan Implementasi Undang –undang Perkawinan tersebut dibutuhkan peran KUA.

Adapun peran KUA dalam implementasi UUP tersebut diantaranya adalah;

- a. KUA sebagai lembaga Dakwah dimana kepala KUA sebagai pimpinan lembaga dakwah memanaj proses implementasi UUP dimulai dari mulai planning, mengorganisir, pelaksanaan (aksi) dan controlling.
- b. Peran sebagai motivator atau da'i adalah kepala mempunyai kegiatan berupa mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan UUP dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawadah wa rahmah.
- c. Peran sebagai konsultan dan advokat dakwah , dimana KUA melayani berbagai pengaduan masalah yang berkaitan dengan permasalahan

pernikahan maupun rumah tangga dan lain sebagainya yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam pemecahan masalah.

- d. Peran sebagai eksekutor dakwah, peran ini menunjukkan dimana KUA sebagai penentu kebijakan yang berkaitan masalah-masalah pernikahan dan keluarga yang dihadapi masyarakat yang sangat dibutuhkan ketetapan dan kepastiannya.
 - e. KUA sebagai Pengelola Logistik Dakwah, peran ini dapat dilihat dapat dilihat dalam pengelolaan biaya pencatatan Nikah/Rujuk.
3. Hasil pelaksanaan implementasi UUP dapat menghasilkan masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang nikah tercatat, berkurangnya nikah sirri dan dibawah umur serta mempunyai kepastian hukum berupa buku nikah dan terciptanya keluarga sakinah mawaddah warohmah.
 4. Dengan implementasi UUP sebaik-baiknya serta peran KUA dalam implementasi tersebut dapat lebih ditingkatkan maka akan terwujud masyarakat Islam yang aman, damai dan tentram.